

B

DAMPAK KRISIS EKONOMI TERHADAP DEMOKRATISASI DI INDONESIA

(Analisis Kebijakan Pemerintah : Mei 1998 - April 1999)

SKRIPSI

KK
Fis P 51/99
Pit
a



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Oleh :

P I T O N O

NIM : 079314232

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**


1999

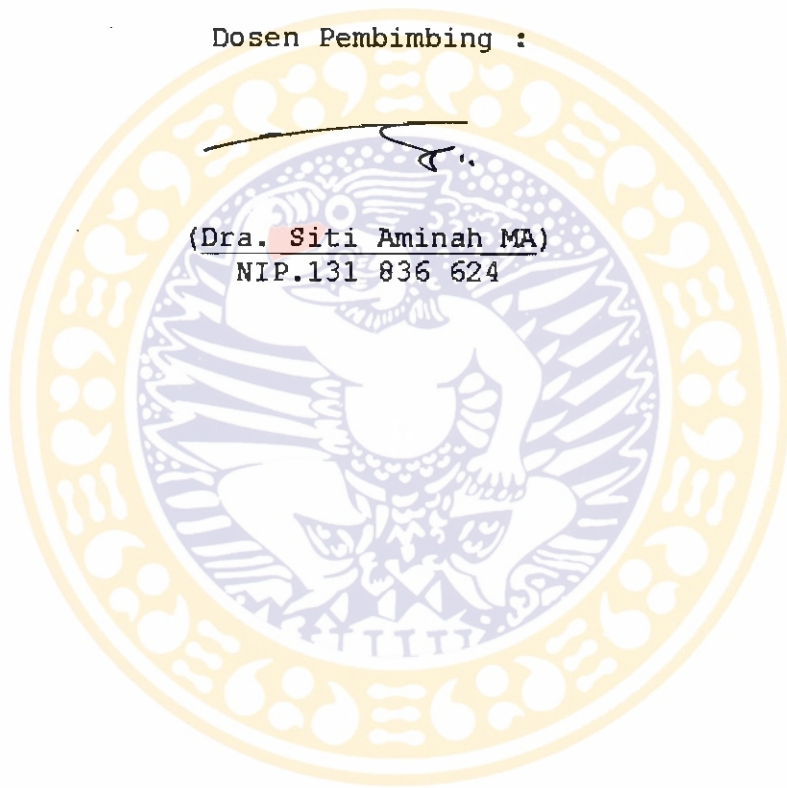
Lembar Persetujuan

Bimbingan Dinyatakan Selesai Dan Siap Untuk Diujikan

Surabaya, 14 Juli 1999

Dosen Pembimbing :


(Dra. Siti Aminah MA)
NIP.131 836 624



Skripsi berjudul :

**DAMPAK KRISIS EKONOMI
TERHADAP DEMOKRATISASI DI INDONESIA**
(*Analisis Kebijakan Pemerintah : Mei 1998-April 1999*)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :


PITONO
NIM 079314232


telah dipertahankan dihadapan panitia
penguji pada tanggal 14 Juli 1999
para penguji terdiri dari :

Ketua,


Dra. Siti Aminah, MA
NIP. 131 036 624

Anggota,


Drs. Haryadi, M.S
NIP. 131 653 466


Dra. Dwi Windyastuti, MA
NIP. 131 801 643

ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud menganalisis kebijakan pemerintah Indonesia sejak naiknya Habibie menjadi presiden, sebagai respon pemerintah terhadap dinamika politik yang terjadi, serta implikasinya terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia.

Dengan menggunakan kebijakan pemerintah sebagai pangkal tolak analisis, penelitian ini mengajukan argumen bahwa, pemerintah saat ini berada pada posisi dimana ia harus responsif terhadap pengaruh "luar" di dalam proses pembuatan kebijakan. Keharusan tersebut terjadi akibat melemahnya posisi negara (pemerintah) dalam proses tawar-menawar dengan "kekuatan luar". "Kekuatan luar" tersebut adalah aspirasi/tuntutan masyarakat domestik serta tekanan internasional khususnya dari lembaga-lembaga donor seperti IMF dan Bank Dunia. Sementara dari dalam pemerintah sendiri keharusan tersebut muncul dari persepsi elite akan kepentingan nasional berupa pemulihan ekonomi dan stabilitas politik.

Dari temuan data yang diperoleh menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan-perubahan yang cukup signifikan, yang memungkinkan bagi terciptanya demokrasi di Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut bisa dilihat dari dua aspek yaitu dari segi proses dan kelembagaan. Dari segi proses dapat dilihat bahwa telah terjadi perubahan cukup berarti dalam proses politik di Indonesia ke arah yang lebih terbuka, inklusif dan demokratis meskipun belum mencapai suatu format yang sempurna. Secara kelembagaan demokratisasi yang telah dihasilkan antara lain: adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berorganisasi, kebebasan pers dan media massa, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, penyelenggaraan demokrasi ekonomi dan sebagainya.

Kata kunci : krisis ekonomi, kebijakan dan demokrasi.